

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adjie, Habib. (2008), *Hukum Notaris Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung.

....., (2015) *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.

....., (2017) *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, Refika Aditama, Bandung.

Adrian, Kevin. (2012), *Pelaksanaan Pemberian Sanksi Pelanggaran Kode Etik Oleh Dewan Kehormatan Dan Majelis Pengawas Di Kota Depok*, Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok.

Amiruddin, Zainal Asikin. (2004) , *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bachrudin. (2021), *Hukum Kenotariatan (Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara)*, Thema Publishing, Yogyakarta.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. (2017) , *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Fuady, Munir, 2018, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.

Ghofur, Abdul, (2009), *lembaga kenotariatan*, UII Press, Yogyakarta.

HS, Salim. (2018). *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta.

....., (2015) *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bnetuk dan Minuta Akta)*, Radja Grafindo, Jakarta

-, (2022) *Pengantar Kode Etik Notaris (Indonesia, Amerika Serikat, Italia, dan Kanada)*, Penerbit Reka Cipta, Bandung.
- Huijbers, Theo, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Jakarta.
- Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hidayat, Komaruddin. (1994), *Arti dan Istilah Pengawasan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Handoko, Widhi. (2019), *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris Antara Ide dan Realitas*, PT. Roda Publika Kreasi, Bogor.
- Kansil, C.S.T. (2009). *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Kelsen, Hans. (2006), *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nuansa & Nusa Pedia, Bandung.
- Koesoemawati, Ira dan Yunirman Rijan. (2009), *KeNotaris*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. (1986), *Mengenal Hukum*, liberty, Yogyakarta.
- Ngadino. (2020), *Tugas Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris Di Indonesia.*, UPT Penerbit Universitas PGRI Semarang Press, Semarang.
- Nuh, M. (2011) , *Etika Profesi Hukum.*, Pustaka Setia, Bandung.
- .
- Pramudya, Kelik dan Ananto Widiatmoko. (2010), *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Poerwadarminta, WJS. (1986). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- R. Subekti, (1993), *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Suteki dan Galang, 2020, *Metode Soekanto*, Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta.

- Salsa, Shidqi Noer. (2020). *Hukum Pengawasan Notaris Di Indonesia Dan Belanda*, Kencana, Jakarta.
- Swasta, Basu. (1996), *Azaz-Azas Marketing Dalam Pengawasan*, Liberty, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta.
- Untung, Budi, 2015, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT)*, Andi, Yogyakarta.
- Winardi. (2000), *Pengawasan Dalam Organisasi Kepemimpinan*, Rineka Cipta, Jakarta..
- Zinal, Asikin. (2012), *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jarawali Press, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 MEI 2015
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Hieraki
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Jurnal-Jurnal :

Asri Muji Astuti, “*Honorarium Notaris Sebagai Upaya Untuk Melindungi Hak Notaris Guna Kepastian Dan Keadilan*”, Jurnal Kenotariatan, (JULI,2016), 3, Mahasiswi Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Edison, Dahlan, Ilyas Ismail,. (2014) *Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris oleh Majelis Pengawasan Daerah di Kota Banda Aceh*, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Volume 2, No 4, November 2014,

Faradina, F. (2011). *Persaingan Tidak Sehat Antar Rekan Notaris Sebagai Dampak Dari Penetapan Tarif Jasa Notaris Dibawah Standar Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris*. Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.

Hariss,A., Felda Rizki Azalia, (2015) *Peranan Majelis Pengawasan Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Notaris di Kota Jambi*, Jurnal Lex Specialist Universitas Batanghari No. 22, Desember 2015.

Hasfarevy,T. (2021), *Peran Dewan Kehormatan Daerah Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kota Pekanbaru*, (Sumatera Utara: Alumni Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol. 3 No.1 Tahun 2021),

Haryati, F. (2018). *Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama Rekan Notaris Ditinjau Dari Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I)*, Jurnal Hukum Volkgeist Vol. 3 No. 1, 2018,

hlm 74-98.

Helena Sheila Arkisanti Kristyanto, Fifiana Wisnaeni, “*PEMBERIAN JASA HUKUM BIDANG KENOTARIATAN BERDASARKAN PASAL 37 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 JABATAN NOTARIS (STUDI KASUS NOTARIS DI KOTA SEMARANG)*”, Jurnal Notarius, Vol. 11 No. 2, (2018), 267, ISSN : 2086-1702, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Mardiansyah, A, Neisa A. A, Iza R. RS, Rizka N., Muhammad S. R., (2020) *Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pada Proses Penyelidikan Suatu Perkara Tindak Pidana Yang Melibatkan Notaris*, (Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Vol : 9 No 1 Mei 2020),

Philipus M. Hadjon. (1996), *penegakan hukum administrasi dalam kaitannya dengan ketentuan pasal 20 ayat 3 dan 4 undang-undang nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup*, fakultas hukum universitas airlangga, nomor 1, tahun XI, januari-februari 1996.

Putri, N. dan Paramita P.,(2019), *Peran Ikatan Notaris Indonesia (iNI) Dalam Penetapan Tarif Diantara Notaris Kota Balikpapan*, (Semarang: Notarius Vol.2 No.1, 2019)

Soegianto, Diah Sulistiyani, Muhammad Junaidi. (2019), *Kewenangan Dewan Kode Etik Notaris Dalam Penegakan Pelanggaran Kode Etik Notaris*, Magister Ilmu Hukum Universitas Semarang, Semarang.

Sulistiyono. (2009). *Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris Oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Di Kabupaten Tangerang*.Jurnal Studi Kenotariatan, Vol 1, No.2, hlm 1-24.

Tata Wijayanta, “*Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*”, Jurnal

Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Modul :

Buku Pedoman Penulisan Tesis, (Semarang : Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2020)

Rujukan Elektronik :

<https://ntt.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/10344-majelis-pengawas-notaris-mpn-dan-majelis-kehormatan-notaris-mkn-merupakan-garda-terdepan-dalam-melakukan-pengawasan-dan-memberikan-sanksi-terhadap-notaris-sesuai-amanat-undang-undang>, diakses pada 23 September 2022, Pukul 11.47.

Dodi Oktarino, 2012, *Perjalanan Sejarah Pengawasan Notaris*, <http://www.dodioktarino.com/2012/05/perjalanan-sejarah-pengawasan-notaris.html>, diakses Pada Tanggal 19 September 2022 Pukul 10.06 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/majelis-kehormatan-notaris-tak-boleh-sembarangan-menolak-penegak-hukum-lt617ff0583d38d?page=3>, diakses pada 23 September 2022, Pukul 12.01 WIB.

<https://silandu.kemenkumham.go.id/sinotaris>, di akses pada tanggal 10 Juli 2022 pukul 14.00 WIB.